

EFEK MEMILIKI PENDAPATAN DAERAH, PENGALOKASIAN DANA UMUM, DAN DANA KHUSUS PADA BELANJA MODAL DI KOTA DAN KABUPATEN SUMATERA UTARA

Anggiat Situngkir^{*)}

John Sihar Manurung^{**)}

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan

Abstract

The purpose of this research is to find out and to analyze whether Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund influence the Capital Expenditure in North Sumatera Province. The analyze method that is used in this research is quantitative method with multiple linier regression with bring about classical assumption test before finding out the best linier model. The variable used in this research are Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund as independent variable and the Capital Expenditure as dependent variable. The population is 33 regencies and cities in North Sumatera, and by using purposive sampling technique, 19 regencies and cities in North Sumatera Province the year 2004 up to year 2007 are chosen as samples. The result proof that Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund influence significantly and simultaneously the Capital Expenditure of regencies and cities in North Sumatera. Adjusted R^2 expressed that 70,9% influence given by Independent variables. The rest 29,1% influence given by other variables is not mentioned in this research model, Partially Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund variable influence Capital Expenditure. This implies to the heads of regencies and cities goverment that General Allocation Fund is a means of even distribution due to fiscal gap, fiscal needs and fiscal capacities determinant to meet the composition of capital expenditure of Regencies and cities in North Sumatera Province.

Keywords: *Regional Own Revenue, Allocation Fund, and Capital Expenditure.*

1. PENDAHULUAN

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan yang mendasar dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumberdaya sebagai akar masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai

teori. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan

^{*)} Anggiat Situngkir, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan (Penulis Utama)

^{**)} John Sihar Manurung, Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan

investasi modal dalam bentuk aset tetap, semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena itu anggaran belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Keterbatasan infra struktur seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya alokasi PAD terhadap Anggaran belanja modal, Apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat?. Studi Abdullah (2004) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk belanja modal justru mengalami penurunan. Abdullah (2004) menduga *power* legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* PAD tidak sesuai dengan preferensi publik.

Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politik (Abdullah, 2004).

Dana Alokasi Umum, adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al.

(1985) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus, merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko;2002). DAK juga memiliki pengaruh terhadap anggaran belanja modal, karena DAK ini juga cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) bahwa Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal dalam APBD dan secara parsial DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan. Penelitian ini menguji kembali penelitian-penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel Dana Alokasi Khusus dengan objek serta periode waktu penelitian yang berbeda dan menghilangkan variabel pertumbuhan ekonomi karena tidak berpengaruh signifikan.

Originalitas Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian relasional yang akan menguji pengaruh, DAU, DAK dan PAD terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara dan merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007). Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Darwanto terletak pada variabel yang diteliti dengan menghilangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan menambah variabel Dana Alokasi Khusus serta objek dan periode waktu penelitian yang berbeda.

Penyusunan Anggaran Sektor Publik di Indonesia. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002).

Proses pembuatan keputusan pengalokasian belanja modal menjadi sangat dinamis karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan

preferensi yang berbeda (Rubin, 1993). Penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan, yakni (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuel, 2000). Sedangkan menurut Von Hagen (2005) penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada dua tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai *agent*.

Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD dan diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Pengalokasian sumberdaya ke dalam belanja modal (*capital expenditure*) merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat (Keefe dan Khemani, 2003). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, anggaran belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*)

dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001). Sesuai aturan APBD dan tujuan otonomi daerah, bahwa hakekat Anggaran Daerah adalah merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus benar-benar menggambarkan perangkaan ekonomis yang mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk memecahkan masalahnya dan meningkatkan kesejahtraannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya disebut Pendapatan Asli Daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 1, "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Dana Alokasi Umum. Dalam pengaturan keuangan menurut UU Nomor 25 tahun 1999 adalah provisi berupa transfer antar pemerintah dari pusat ke kabupaten dan kota yang disebut dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Alokasi Umum adalah merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain tujuan alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia (Kuncoro 2004)

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin *et al.* (1985) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko 2002).

Belanja Modal dalam Anggaran Daerah. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun 2005).

Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya.

Dari penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya. Sulistiawan (2005) meneliti pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah dan menemukan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Maimunah (2004) melakukan penelitian tentang *Flypaper Effect* pada DAU dan PAD terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatera dan menemukan besarnya nilai DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan ada Pengaruh *flypaper effect* dalam memprediksi belanja daerah periode ke depan

Penelitian Darwanto (2007) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU

terhadap alokasi belanja modal dan menemukan secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan.

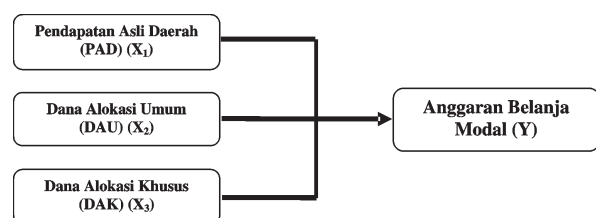
Kerangka Konseptual. PAD adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah *ketimpangan horizontal* (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

DAK adalah merupakan transfer yang bersifat khusus untuk mengatasi masalah khusus dengan dana pendampingan dari APBN dengan tujuan utama pembangunan nasional.

Anggaran Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun 2005).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk kualitas pelayanan publik. Besarnya belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD tentu sangat dipengaruhi oleh posisi keuangan pada daerah tersebut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Tujuan Penelitian. Sesuai masalah penelitian maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

dan menganalisa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.

Hipotesis Penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, dan tujuan penelitian, maka hipotesis penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Anggaran belanja modal”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Hasil pengujian data digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Lokasi Penelitian dan Sampel. Lokasi penelitian ini di Propinsi Sumatera Utara untuk kabupaten dan kota. Dari 33 daerah kota dan kabupaten di seluruh Pemerintahan Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara terdapat 33 kabupaten dan kota dan hanya sebanyak 19 yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai sampel penelitian dari pengamatan tahun 2004-2007. Penarikan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria yaitu: (1) Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara yang mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten dari tahun 2004-2007; (2) Pemerintah daerah kabupaten dan kota yang tidak dimekarkan pada kurun waktu 2004-2007. Dari 33 daerah kota dan kabupaten yang dijadikan populasi, hanya sebanyak 19 yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai sampel penelitian (Tabel.1).

Metode Pengumpulan Data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari dokumen laporan APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui www.depkeu.djpk.go.id dan BPS Sumut melalui www.bps.go.id/sumut. Jadi

teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan observasi.

Defenisi dan Pengukuran Variabel. Variabel bebas (*Independent Variable*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PAD, DAU dan DAK. Variabel terikat (*dependent variable*) yang merupakan perhatian utama adalah anggaran belanja modal. Untuk menjelaskan variabel-variabel yang sudah diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) PAD, Total realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain penerimaan PAD yang sah dengan menggunakan skala rasio.
- 2) DAU, Total dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah *ketimpangan horizontal* (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan menggunakan skala rasio.
- 3) DAK adalah total dana transfer dari pemerintah pusat bersifat khusus dengan menggunakan skala rasio.
- 4) Anggaran Belanja Modal adalah total anggaran pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dengan menggunakan skala rasio.

Uji Asumsi Klasik. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi maka diperlukan pengujian asumsi klasik meliputi: (1) Uji Normalitas; (2) Uji Multikolinieritas; (3) Uji Heteroskedastisitas; (4) Uji Autokorelasi.

Model Pengujian Hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi (α) 0,05 atau 5%. Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, maka dilakukan pengujian terhadap variabel-variabel penelitian dengan cara menguji secara simultan dengan menggunakan uji statistik F dan sedangkan untuk menguji masing-masing variabel secara parsial, dilakukan dengan uji signifikansi parameter individual (uji t statistik).

Model regresi yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + \beta_3 \text{DAK} + e$$

dimana :

Y = Anggaran belanja modal (BM)

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

e = error

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian. Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa dari jumlah N sampel sebanyak 76, dimana rata-rata jumlah PAD Kabupaten Kota di Sumut sebanyak Rp.30.728 Milyar dengan jumlah PAD terendah sebesar Rp.4.262 Milyar dan tertinggi sebanyak Rp.324.263 Milyar dengan standar deviasi Rp.64.162 Milyar dari rata-rata. PAD menggambarkan kemampuan Pemda/ Pemko menggali potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam merealisasikan PAD yang direncanakan guna untuk membiayai daerah pemerintahannya, berdasarkan potensi riil daerah. Secara keseluruhan PAD Propinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini merupakan akibat perkembangan pesat pajak daerah dan retribusi daerah. Rata-rata jumlah DAU Kabupaten Kota di Sumut sebanyak 287.920 Milyar Rupiah dengan jumlah DAU terendah sebesar 93.121 Milyar Rupiah dan DAU tertinggi sebanyak 748.707 Milyar Rupiah dengan standar deviasi 156.944 Milyar Rupiah dari rata – rata. Rata-rata jumlah DAK Kabupaten Kota di Sumut sebesar 21.436 Milyar Rupiah dengan jumlah DAK terendah sebesar 4 Milyar Rupiah dan DAK tertinggi sebanyak 66.721 Milyar Rupiah dengan standar deviasi 16.880 Milyar Rupiah dari rata – rata. Sedangkan rata – rata anggaran belanja modal sebesar 88.76 Milyar Rupiah dengan jumlah anggaran belanja modal terendah sebesar Rp. 7.10 Milyar dan tertinggi sebesar Rp. 435.00 Milyar dengan standar deviasi 78.38 dari rata-rata.

Analisis Data. Untuk menguji apakah data penelitian ini terdistribusi normal atau tidak dideteksi melalui 2 cara yaitu analisis grafik dan analisis statistik (uji *One sample Kolmogorov Smirnov*). Analisis Grafik, berdasarkan pada hasil grafik terlihat bahwa titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonalnya maka dapat dinyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Uji Statistik, dari hasil uji *one sample Kolmogorov Smirnov Test* terlihat besarnya nilai Kolmogorov- Smirnov adalah 0.844 dan signifikansinya pada 0.475 dan nilainya jauh diatas $\alpha = 0.05$ Dalam hal ini berarti H_0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas, hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dibawah angka 10 ($VIF < 10$). Hal ini berarti bahwa regresi yang dipakai untuk ke 3 (tiga) variabel independen diatas tidak terdapat persoalan multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas, hasil uji Glesjer menunjukkan koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan PAD (X_1) dengan tingkat signifikansi 0.089, DAU (X_2) dengan tingkat signifikansi 0.542 dan DAK (X_3) dengan tingkat signifikansi 0.343. Maka dapat disimpulkan model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi, Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai statistik Durbin-Watson (D-W) sebesar 1,642, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif (angka D-W antara -2 dan +2).

Hasil Analisis, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,709. Hal ini menunjukkan bahwa 70,9 % variabel anggaran belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel independen, sisanya sebesar 29,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini.

Model Uji Hipotesis

Uji Signifikan Simultan (Uji F), secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Dari uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 61,966 sedangkan F_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) adalah 2,52. Hal ini berarti bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($61,966 > 2,52$). Hal ini memberikan arti

bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera ditolak (H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima).

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU dan DAK berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dapat diterima.

Hasil perhitungan koefisien regresi menggunakan SPSS diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\text{Belanja_Modal_Y} = -16850 + 0,504X_1 + 0,191X_2 + 1,633X_3$$

Model persamaan regresi berganda tersebut bermakna :

- 1) Nilai konstanta sebesar 16850 artinya apabila nilai variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus bernilai nol, maka Anggaran Belanja Modal sebesar 16850 satuan.
- 2) Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif anggaran belanja modal dengan nilai koefisien sebesar 0.504, artinya setiap pertambahan 1 % variabel PAD akan menaikkan anggaran belanja modal sebesar 0.504 satuan.
- 3) Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal dengan nilai koefisien sebesar 0.191, artinya setiap pertambahan 1 % variabel DAU akan menaikkan anggaran belanja modal sebesar 0.191 satuan.
- 4) Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal dengan nilai koefisien sebesar 1,633 artinya setiap pertambahan 1 % variabel DAK akan menaikkan anggaran belanja modal sebesar 1,633 satuan.

Hasil uji menunjukkan bahwa variabel PAD_ X_1 ($4,802 > 1,980$) berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah di Sumatera Utara dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dengan demikian menerima

H_1 dan menolak H_0 . Sedangkan variabel Dana Alokasi Umum (X_2) dengan arah positif ($3,814 > 1,980$) berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah di Sumatera Utara dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Variabel DAK_ X_3 ($4,101 > 1,980$) berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah di Sumatera Utara dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dengan demikian menerima H_1 dan menolak H_0 .

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Secara parsial hanya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian Darwanto (2007) yang menyatakan PAD berpengaruh signifikan dalam alokasi belanja modal.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini yaitu : (1) Sampel dalam penelitian ini dibatasi pada kabupaten/kota tertentu yang memiliki ketersediaan data, yaitu 19 kabupaten/ kota di Propinsi Sumatera Utara. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk kabupaten/ kota yang menjadi sampel penelitian, sehingga belum dapat di generalisasi untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia; (2) Penelitian ini tidak memberikan secara rinci alokasi penggunaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum manakah yang memberikan kontribusi besar terhadap anggaran belanja modal; dan (3) Penelitian ini tidak membahas kebijakan pemerintah dalam penyusunan anggaran Belanja Modal.

Saran

- 1) Bagi peneliti berikutnya dimasa mendatang agar dapat memperluas atau menambah sampel penelitian seperti sampel dari luar Sumatera Utara atau seluruh Indonesia dengan menambah periode pengamatan.

- 2) Peneliti berikutnya sebaiknya menambah variabel atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi Anggaran belanja modal seperti kebijakan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Richard dan Tommasi, Daniel. 2001. *Managing a Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*;: OECD Paris.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol 08 No 01. February 2007, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Departemen Keuangan RI. *Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah 2009*. www.depkeu.djpk.go.id. akses 05 Juni 2009.
- Fozzard, Adrian. 2001. The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting. *Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). Working paper 147*. www.odi.org.uk/resources/odi-publications/working-papers/147-resource-allocation-public-sector-pro-poor-budgeting.pdf diakses 1 April 2009
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Keefer, Philip and Khemani, Democracy, Public Expenditures, and the Poor. 2003. *World Bank Policy Research Working Paper 3164*.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and Cultural Change, Chicago.. <http://www3.nccu.edu.tw/~jthuang/Fiscal%20Decentralization%20and%20Economic%20Growth.pdf> diakses 1 April 2009.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi , Yogyakarta
- Rubin, Irene S. 1993. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Second edition. Chatham, NJ: Chatham House Publishers, Inc.
- Samuels, David. 2000. Fiscal horizontal accountability? Toward theory of budgetary "checks and balances" in presidential systems. University of Minnesota, *Working paper presented at the Conference on Horizontal Accountability in New Democracies, University of Notre Dame, May*.
- Stine, William F. 2001. Is Local Government Revenue Responseti Federal Aid Symmetrical? Evidence From Pennsylvania Country Government in an era of Retrenchment. *National Tax Journal* 47.No. 4.
- Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Fall. 16.3. Hal : 413-423.
- Von, Hagen.2005. Political Economy of Fiscal Institutions, *Discussion paper 149, Governance and efficiency of Economic System, GESY*.
- www.bps.go.id/sumut dan www.depkeu.djpk.go.id

Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	KRITERIA		SAMPEL
		1	2	
1.	Kota Binjai	√	√	Sampel 1
2.	Kota Medan	√	√	Sampel 2
3.	Kota Sibolga	√	√	Sampel 3
4.	Kota Padang Sidempuan	X	X	-
5.	Kota Tebing Tinggi	√	√	Sampel 4
6.	Kota Tanjung Balai	√	√	Sampel 5
7.	Kota Pematang Siantar	√	√	Sampel 6
8.	Kabupaten Asahan	√	√	Sampel 7
9.	Kabupaten Humbang Hasundutan	X	X	-
10.	Kabupaten Toba Samosir	√	√	Sampel 8
11.	Kabupaten Tapanuli Selatan	√	√	Sampel 9
12.	Kabupaten Tapanuli Tengah	√	√	Sampel 10
13.	Kabupaten Batubara	X	X	-
14.	Kabupaten Pakphak Barat	X	X	-
15.	Kabupaten Tapanuli Utara	√	√	Sampel 11
16.	Kabupaten Nias Selatan	X	X	-
17.	Kabupaten Deli Serdang	√	√	Sampel 12
18.	Kabupaten Karo	√	√	Sampel 13
19.	Kabupaten Serdang Bedagai	X	√	-
20.	Kabupaten Labuhan Batu	√	√	Sampel 14
21.	Kabupaten Nias	√	√	Sampel 15
22.	Kabupaten Langkat	√	√	Sampel 16
23.	Kabupaten Mandailing Natal	√	√	Sampel 17
24.	Kabupaten Samosir	√	X	-
25.	Kabupaten Simalungun	√	√	Sampel 18
26.	Kabupaten Dairi	√	√	Sampel 19
27.	Kabupaten Angkola Sipirok	X	X	-
28.	Kabupaten Padang Lawas	X	X	-
29.	Kabupaten Padang Lawas Utara	X	X	-
30.	Kabupaten Nias Utara	X	X	-
31.	Kabupaten Labuhan Batu Utara	X	X	-
32.	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	X	X	-
33.	Kota Gunung Sitoli	X	X	-

Sumber : www.depkeu.djpk.go.id. 2009.

Lampiran Hasil SPSS

**Tabel.2. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM_Y	76	7100.00	435000.00	88763.68	78378.80815
PAD_X1	76	4262.52	324263.23	30714.78	64167.11465
DAU_X2	76	93121.00	748707.00	287920.3	156944.33583
DAK_X3	76	4000.00	66721.00	21436.03	16880.93617
Valid N (listwise)	76				

**Tabel.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
ANOVA(b)**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	332112549790.753	3	110704183263.585	61.966	.000(a)
	Residual	128630267777.669	72	1786531496.912		
	Total	460742817568.421	75			

a Predictors: (Constant), DAK_X3, PAD_X1, DAU_X2

b Dependent Variable: BM_Y

Tabel 3. Uji Signifikan Simultan dan Autokorelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Change Statistics				Durbin-Watson			
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	F Change	Sig. F Change				
1	.849 ^a	.721	.709	2267.38100	.721	61.966	3	72	.000	1.642

a.Predictors: (Constant), DAK_X3, PAD_X1, DAU_X2

b. Dependent Variable: BM_Y

Tabel.4. Uji Signifikan Parsial dan Uji Multikolinearitas

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-16850.0	10568.957		-1.594	.115		
	PAD_X1	.504	.105	.413	4.802	.000	.525	1.904
	DAU_X2	.191	.050	.383	3.814	.000	.384	2.605
	DAK_X3	1.633	.398	.352	4.101	.000	.527	1.898

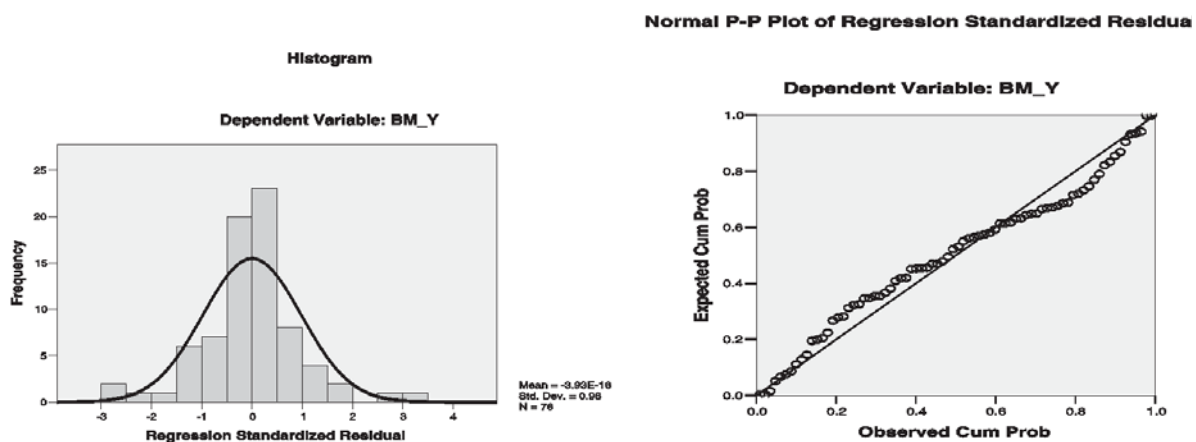
a. Dependent Variable: BM_Y

Tabel.5 Uji Kolinearitas
Collinearity Diagnostics ^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	Variance Proportions		
					PAD_X1	DAU_X2	DAK_X3
1	1	2.979	1.000	.02	.02	.01	.02
	2	.766	1.973	.01	.43	.00	.05
	3	.196	3.897	.62	.04	.00	.41
	4	.059	7.084	.35	.51	.99	.53

a. Dependent Variable: BM_Y

Gambar.1 Normalitas dengan Histogram dan P Plot



Gambar.3. Distribusi data

